

## Pemkot Bandung Akan Awasi Peredaran Baju Bekas Impor

**BANDUNG (IM)** - Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mengaku, akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait membahas teknis pengawasan peredaran baju bekas.

Hal tersebut, dikemukakan Ema Sumarna seiring dilarangnya peredaran baju bekas impor atau thrifting oleh pemerintah pusat baru-baru ini.

Pengawasan pun akan dilakukan pihaknya secara maksimal.

"Kalau ini ditemukan sebagai bagian barang yang dilarang, ya mungkin nanti kita koordinasi dengan instansi yang lebih berwenang," kata Ema Sumarna pada Kamis (16/3).

Ema Sumarna menyebutkan, pihaknya belum mengetahui teknis penindakan terhadap peredaran baju bekas impor yang kini dilarang. Namun, untuk barang-barang ilegal akan langsung dilakukan penindakan.

"Ya mungkin nanti kita melaporkan, bahwa barang ini legal atau ilegal. Kalau

ilegal, apapun juga tentunya menjadi sesuatu yang harus kita lakukan tindakan. Kan begitu," ucapnya.

Menurut Ema, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan dokumen. Namun begitu, pengawasan tetap akan dilakukan maksimal.

"Jadi pengawasan yang harus benar-benar secara maksimal. Karena kalau harus mengawasi barang masuk di Bandung, bagaimana caranya mengawasinya. Kecuali barang-barang yang sudah ada di sarasannya," ujar dia.

Ema menambahkan, apakah pihaknya diberikan kewenangan untuk menandatangani dokumen. Namun, praktik tersebut relatif sulit dilakukan karena tidak memiliki kewenangan.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting. Peredaran baju bekas impor, dinilai mengganggu industri tekstil di dalam negeri. ● **pra**

## Dinkes Kab. Tangerang Instruksikan RS Bentuk Tim Asuhan Gizi

**TANGERANG (IM)** - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, menginstruksikan semua rumah sakit (RS) agar membentuk tim asuhan gizi.

Tujuannya agar dapat membantu masyarakat dalam mengatasi kasus stunting.

"RS yang ada di Kabupaten Tangerang dapat membentuk tim asuhan gizi, sehingga dapat membantu mengatasi balita yang gagal tumbuh (weight faltering), gizi kurang dan gizi buruk yang sudah ditangani di puskesmas namun tidak ada perbaikan yang adekuat," ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Tangerang, Sri Indriyani di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (16/3).

Menurut Sri, kebijakan itu selaras dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Sehingga, pihaknya berharap dengan keterlibatan RS maka penanganan kasus baru stunting di Kabupaten Tangerang bisa dicegah.

Pasalnya, jika nantinya ditemukan kasus balita bermasalah gizi di RS, ada tindak lanjut yang dilakukan petugas puskesmas dengan

mengikuti instruksi dari dokter spesialis.

Dia menyebutkan, peran rumah sakit dalam penurunan kasus stunting sangat penting.

Hal itu sesuai dengan Kepmenkes Nomor 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi RS.

"Kegiatan ini bisa memberikan makna yang baik dalam upaya mencegah terjadinya stunting di Kabupaten Tangerang. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 37 peserta terdiri dari dokter spesialis anak, dietisien dan perawat dari 12 rumah sakit baik rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Tangerang," kata Sri

Satgas Stunting Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Banten, Novitria Dwinanda menjelaskan, Dinkes Kabupaten Tangerang benar-benar sangat serius dalam percepatan penurunan stunting di wilayahnya.

"Penurunan angka stunting tidak bisa hanya satu sektor saja. Alhamdulillah, Dinkes Kabupaten Tangerang memfasilitasi kegiatan ini untuk me-refresh ulang bagaimana caranya mendeteksi masalah gizi," ucapnya. ● **pp**

## Masyarakat Diminta Tidak Mendirikan Bangunan di Wilayah Sungai

**BANDUNG (IM)** - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna meminta, masyarakat perlu mengetahui aturan tentang pemanfaatan saluran air. Utamanya soal bangunan di atas, dan sempadan saluran.

Hal tersebut, dikemukakan Ema Sumarna setelah menerima informasi adanya bangunan roboh yang berada di Jalan Cibolerang, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung pada Selasa 14 Maret 2023.

"Kalau ada benda apa pun, termasuk bangunan di atas selokan, saya pikir tidak ada payung hukum untuk menguatkan. Artinya hukum harus ditegakkan, harus dibongkar," kata Ema Sumarna pada Kamis (16/3).

Ditegaskan Ema Sumarna, bangunan-bangunan yang berdiri di sempadan saluran telah menyalahi aturan.

Keberadaan bangunan-bangunan tersebut, sudah tentu ilegal dan sangat membahayakan.

Di lain sisi, Ema tidak menampik bahwa masih adanya pengawasan lemah dari pemerintah.

Sehingga, banyak masyarakat dengan leluasa mendirikan bangunan-bangunan ilegal di sempadan

saluran. "Saya akui, bahwa pengawasan dari institusi pemerintah tidak optimal. Seharusnya unsur kewilayahan, dan dinas terkait tahu. Ini jangan terus dibiarkan. Namanya saluran air seperti sungai kan harus bebas hambatan," ucapnya.

Maka Ema meminta kepada dinas-dinas terkait perlunya meningkatkan pengawasan.

Jangan sampai keberadaan bangunan-bangunan tersebut, menjadi bomerang. Bahkan menimbulkan korban di kemudian hari.

"Bangunan-bangunan seperti itu bongkar saja. Karena apapun itu, harus tertib, harus ikuti aturan. Apalagi ini sifatnya fisik, barang tentu kelihatan. Maka mari bangun kesadaran masyarakat, dan aparatnya," ujar dia.

Sebelumnya, bangunan ruko di Jalan Cibolerang, Kota Bandung ambruk pada 14 Maret sekitar pukul 16.30 WIB. Ruko satu lantai itu, roboh ketika debit air sungai meninggi akibat curah hujan dua hari kebelakang.

Selain faktor usia bangunan yang sudah cukup tua. Pondasi bangunan yang menjadi penyanga, bersebelahan langsung dengan aliran sungai. ● **pra**

# 8 | Nusantara

IDN/ANTARA



### KAKA SLANK KUNJUNGI PULAU LABENGI

Vokalis grup band Slank Kaka berdiri di batu karst Blue Lagoon Pulau Labengki, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis (16/3). Sebelum menggelar konser di Kendari, Kaka menyempatkan diri menikmati destinasi Pulau Labengki.

## Ketua DPRD Sesalkan TPP ASN di Pemkab Bogor Belum Cair

Sampai hari ini Maret 2023 Tunjangan Penghasilan Pegawai belum dicairkan. Itu hak yang harus diterima oleh para ASN. Jangan sampai orang yang sudah bekerja dengan baik melayani masyarakat, lalu sampai harus menunggu keringat mereka kering baru dibayar," ujar Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.

**BOGOR (IM)** - Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor belum cair, disesali oleh Ketua DPRD Kabupaten

Bogor, Rudy Susmanto. Dia menyayangkan lambannya Pemerintah Kabupaten Bogor mencairkan anggaran belanja wajib dan mengikat yang sudah dianggarkan oleh DPRD dalam APBD 2023.

Menurut Rudy, lambannya pencairan anggaran TPP ASN yang menjadi hak para pegawai, bisa berdampak pada turunnya kualitas pelayanan.

"Sampai hari ini Maret 2023 TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai-red) belum dicairkan. Itu hak yang harus diterima oleh para ASN. Jangan sampai orang yang sudah bekerja dengan baik melayani masyarakat, lalu sampai harus menunggu keringat mereka kering baru dibayar," ujar Rudy Susmanto, Kamis (16/3).

Rudy meminta TPP ASN yang sudah menjadi hak pegawai segera dicairkan. Selain itu, beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, ke-

camatan juga harus secepatnya dicairkan. Rudy mengaku mendapat banyak keluhan dari sejumlah ASN soal hal tersebut.

"Beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan segera dicairkan, agar masyarakat memasuki hari raya idul fitri bisa menikmati infrastruktur yang baik," kata Rudy menanggapi TPP ASN belum cair.

Rudy juga mengingatkan, salah satu fungsi APBD adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, APBD harusnya bisa dicairkan lebih awal, agar putaran uang dapat dirasakan masyarakat. Apalagi, kata Rudy untuk urusan belanja wajib yang mestinya sudah terjadwal setiap bulan.

"Sejak awal Kami selalu ingatkan agar proses yang berkaitan administrasi diselesaikan di awal-awal tahun. Februari mestinya program sudah berjalan," imbuhnya.

Seperti diketahui, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini tengah menjerit. Pasalnya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sampai saat ini belum juga cair.

Apalagi, wilayah tetangga seperti Kota Depok dan Kota

Bogor sudah cair terlebih dahulu. Hal ini pun membuat para abdi negara di lingkungan Kabupaten Bogor risih, bahkan sempat terlontar dari salah satu PNS di Pemkab Bogor bahwa sistem saat ini semakin bobrok.

"TPP saja sampai sekarang belum juga cair, bagaimana Kabupaten Bogor mau maju jika dalam memenuhi hak pegawainya terhambat seperti ini. Menjerit kami itu sekarang kalau boleh jujur," cetus salah seorang PNS yang enggan disebutkan namanya, Senin (13/3).

Terlebih, belum adanya kejelasan dari dinas terkait yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait nasib PNS yang memang membutuhkan TPP ASN. "Ini jangan semena-mena begitu dong, kalau seperti ini kan kami yang jadi korban," cetusnya.

Terlebih, belum adanya kejelasan dari dinas terkait yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait nasib PNS yang memang membutuhkan TPP ASN. "Ini jangan semena-mena begitu dong, kalau seperti ini kan kami yang jadi korban," cetusnya. ● **pra**

## Wagub Jabar: Pesantren Perlu Miliki Sumber Ekonomi Agar Bisa Bertahan

**BANDUNG (IM)** - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum menyebut pondok pesantren perlu memiliki sumber ekonomi agar mampu bertahan dari generasi ke generasi.

Dia menilai banyak pesantren di Jawa Barat memiliki kekurangan dalam bidang ekonomi dan hanya mengandalkan dari iuran para santri, zakat, infak, dan sedekah.

"Kalau punya pendapatan khusus, Insya Allah tidak akan mengandalkan pendapatan model tersebut, pesantren dapat tetap eksis," kata Uu di Pondok Pesantren Persis 259 Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/3). Uu mengatakan pondok pesantren di Jawa Barat itu biasanya berdiri megah, tetapi lama kelamaan hilang keberadaannya karena penerus pondok pesantren yang tidak memiliki legitimasi dan tidak didukung sumber ekonomi yang baik.

"Tapi kalau di pesantren luar Jawa Barat, ekonominya hebat, punya pabrik gula, punya tanah kontrak, punya supermarket, ekonominya tangguh. Di saat pergantian generasi, karena tidak mengandalkan sumbangan, maka pesantren di luar Jawa Barat masih semakin kokoh," katanya.

Untuk itu, menurutnya pendidikan entrepreneurship bagi para santri merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar pun, kata dia, memiliki program

untuk mendorong hal tersebut lewat Program One Pesantren One Product (OPOP).

Selain itu, lanjutnya, para santri juga perlu memahami sistem bisnis secara digital melalui beragam e-commerce. Salah satunya, kata dia, yang dilakukan e-commerce Shopee dengan mendidik para santri lewat Program Shopee Barokah.

"Kami berharap kegiatan ini memiliki efek domino, dimana santri yang sudah dididik menjadi pengusaha yang hebat pada masa yang akan datang, kemudian pesantren yang mendapatkan program ini memiliki sumber ekonomi yang hebat," kata dia.

Sementara itu Direktur Shopee Barokah Bukhori Muslim mengatakan para santri memiliki potensi yang dapat berdampak positif secara sosial dan juga ekonomi jika dikembangkan.

Pihaknya telah melihat banyak kisah sukses dari pengusaha lokal yang mampu berdaya, mandiri, dan menjadi pilar bagi komunitas, setelah masuk ekosistem digital. Untuk itu, ia juga ingin membawa dampak positif yang sama ke lingkungan pesantren yang dikenal telah memproduksi banyak produk berkualitas.

"Program Dari Pesantren untuk Pesantren kami hadirkan untuk membawa teman-teman santri ke level selanjutnya, dan bisa mencapai kemandirian secara ekonomi. Selain juga mampu membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar," kata Bukhori. ● **pra**

## DPRD Kota Bogor Mulai Bahas Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia

**BOGOR (IM)** - DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna internal, untuk menyetujui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kota Bogor tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia pada Rabu (15/3) malam.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin dan ada penyampaian laporan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor.

Juru bicara Bapemperda DPRD Kota Bogor, Rizal Utami menyampaikan, latar belakang dan tujuan dibentuknya Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi lansia pada pemenuhan hak-hak individu termasuk kesehatan, kesempatan kerja, pelayanan sosial, pendidikan, bantuan hukum dan bantuan sosial.

"Peraturan Daerah ini memiliki maksud untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap lanjut usia untuk mewujudkan lanjut usia yang memiliki kemandirian," ungkap Rizal kepada wartawan pada Kamis (16/3).

Rizal membeberkan, adapun materi pokok dari Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia terdiri dari 9 bab dan 25 pasal dimana didalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana dan sanksi administrasi bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap lansia.

"Semoga apa yang kami upayakan menjadi ibadah untuk kita semua," pungkasnya. Sementara itu, fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor pun menyampaikan pandangannya terhadap Raperda yang diajukan oleh Bapemperda ini.

Juru bicara Fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, menyampaikan jumlah penduduk Lanjut Usia (lansia) yang membesar ternyata berpotensi memberikan banyak keuntungan

jika mereka tetap tangguh, sehat dan produktif. "Lansia bukanlah beban negara. Justru mereka adalah penyangga pembangunan, karena para lansia dengan kematangan pola hidup dan pikirnya merupakan 'penjaga nilai', menjadi tuntunan hidup antar generasi," jelas Safrudin.

Safrudin menyampaikan, dengan visi Kota Keluaga, Pemkot Bogor harus terus mengkampanyekan kepada masyarakat untuk terus mencintai keluarga, mencintai orang tua, dan juga hormat kepada mereka, jangan sampai ada generasi muda mengabaikan dan tidak hormat orang tua sehingga mereka cenderung cuek, tidak peduli dan juga menghina.

"Sehingga, bahwa seluruh fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor menyetujui dilanjutkannya pembahasan Raperda inisiatif DPRD Kota Bogor tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia dengan dibentuknya panitia khusus dalam waktu dekat ini," terangnya. ● **jay**



### PEREKAMAN E-KTP WARGA BINAAN

Petugas melakukan pengecekan iris mata warga binaan di Lapas kelas II B Indramayu, Jawa Barat, Kamis (16/3). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu melakukan perekaman data dan cek biometrik bagi warga binaan di lapas tersebut untuk perekaman KTP elektronik serta sebagai persiapan data pemilih pada Pemilu 2024 dan keperluan lainnya terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).